

Pengayaan Pengetahuan Lokal, Pembangunan Pranata Sosial: Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Kemitraan¹

Yunita T. Winarto

Ezra M. Choesin

(Universitas Indonesia)

Abstract

For three decades, the management of natural resources has been oriented towards increased production and profit in the national economy or for certain stakeholders, sacrificing conservation and the prosperity of local people. The unavoidable results are the deterioration of natural resources, ecological pollution, and a decline in the people's ways and standards of living.

This paper attempts to show that the sustainable management of natural resources can only be achieved if the state surrenders its domination and delegates rights to the local people as active actors. Besides the stories of how rich local knowledge are, some studies point out that local people have limited knowledge of the ecosystem, which carries the implication of weaknesses in natural resource management. Other cases focus on how the social institution (rules, conventions and control mechanisms) needed to overcome the problems of resource management has not been internalized, or has either been marginalized, or substituted by ineffective government institutions.

The cases of rice farmers in Lampung and fish farmers in South Sulawesi as illustrated in this paper will show that special attention should be given to the enrichment of local knowledge, along with the creation, establishment and development of social institutions. For the sustainable management of natural resources in this country, it is important to consider the local people's rights of managing resources on their own, and the need for facilitation on the basis of partnership.

Pendahuluan: pengetahuan dan institusi sosial

Dalam berbagai kajian terdahulu tentang masalah-masalah yang timbul dalam

pengelolaan sumberdaya alam, kaitannya dengan pembangunan, dan peranan penduduk setempat, fokus permasalahan dan penjelasan yang diberikan terutama mengacu pada salah satu faktor, apakah itu berkaitan dengan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) penduduk setempat,² ataukah dengan

¹ Tulisan ini merupakan hasil revisi dari makalah yang disajikan dalam Panel mengenai: 'Pengelolaan Sumberdaya Lokal: Antara "Keuntungan" dan "Kelestarian"' dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-1: 'Memasuki Abad Ke-21: Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenali Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa', Universitas Hasanuddin, Makassar, 1-4 Agustus 2000.

² Lihat misalnya artikel-artikel yang disajikan dalam Brokensha, Warren dan Werner (1980); Warren, Slikkerveer dan Borkensha (1995); edisi-edisi dari Jurnal *Indigenous Knowledge and Development Monitor*,

pembangunan pranata sosial atau modal sosial (*social capital*).³ Masing-masing merupakan faktor yang berperan penting dalam menunjang keberlanjutan dan ketangguhan ekosistem, tetapi yang kerap kali justru terabaikan dalam upaya-upaya eksplorasi sumberdaya alam. Bahkan, keduanya terpinggirkan oleh domain pengetahuan ilmiah, serta pranata-pranata sosial hasil reka-cipta para birokrat atau agen-agen pembangunan. Dalam dasa warga terakhir, telah semakin besar perhatian para ilmuwan, dan agen-agen pembangunan pada pentingnya pelibatan kedua hal itu dalam upaya penanggulangan degradasi lingkungan.

Pengetahuan lokal, misalnya, tidak hanya dilihat sebagai faktor yang potensial; tetapi juga memiliki kekurangan dalam membantu para pendukungnya untuk memahami dinamika lingkungan hidup yang kompleks, serta kondisi ketidakpastian yang besar. Karena itu, pengayaan pengetahuan lokal dipandang amat signifikan. Pembentukan dan pengembangan pranata sosial di kalangan penduduk setempat pun dinilai semakin relevan bagi upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang tangguh. Telah semakin disadari bahwa pemerintah bukanlah merupakan aparat yang mampu menanggulangi berbagai masalah lingkungan hidup yang sangat beragam dan dinamis (lihat Ostrom 1994). Penanggulangan masalah pengelolaan sumberdaya alam kini seyoginya

Jurnal *Antropologi Indonesia* 22(55), dll. yang mengemukakan kontribusi positif dari pengetahuan lokal pada pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam di satu pihak, serta kendala dan masalah yang ada di pihak lain.

³ Pentingnya perhatian pada pembangunan pranata sosial atau modal sosial telah dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya Wilson (1997); Ostrom (1992, 1999); Ostrom, Schroeder dan Wynne (1993), terutama dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya yang ‘terbuka perolehannya’ (*open access resources*).

lah dilaksanakan dengan sepenuhnya melibatkan penduduk setempat itu sendiri. Sekalipun demikian, masih menjadi pertanyaan besar sejauhmanakah pemerintah secara sungguh-sungguh memberikan pelimpahan wewenang dan kepercayaan yang besar pada penduduk setempat untuk mengelola relungnya? Bila telah dijumpai adanya itikad ke arah itu, sejauhmanakah hal itu terlaksana? Bagaimana pulakah penduduk setempat diposisikan dalam upaya tersebut?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu terjawab dengan upaya meminimalisasi peran pemerintah, patut pula diperhatikan sejauhmanakah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sumberdaya lokal pada penduduk setempat tanpa memperhatikan secara seksama kondisi pengetahuan lokal dan pranata sosial, serta konteks permasalahan yang ada, merupakan hal yang bijaksana. Sudah jelas, hal itu belum tentu menyelesaikan masalah. Dari berbagai upaya pelaksanaan program-program pembangunan dan pendampingan, masih terkesan adanya ketidaksungguhan pihak pemerintah dalam menemukan kondisi ini. Demikian pula fokus perhatian yang masih parsial dan tidak komprehensif. Padahal, kedua faktor itu (pengetahuan lokal dan pranata sosial) saling terkait satu sama lain dan akan sangat potensial apabila keduanya secara bersamaan dikembangkan secara optimal.

Pengetahuan terletak pada diri individu. Namun, kajian terhadap individu lebih sering dianggap di luar lingkup ilmu-ilmu sosial. Relevansi proses-proses pemahaman dalam individu terhadap pemantapan maupun perubahan aturan-aturan yang dimiliki bersama (*shared*), kurang ditekankan. Ketika ahli-ahli antropologi (yang lazim dimasukkan ke dalam kelompok antropologi psikologi dan kognitif) berbicara tentang individu, mereka sering dikatakan berpikir *reductionistic* atau terlalu

melihat pada hal-hal yang sebenarnya *idiosyncratic*.

Pengetahuan lokal bukanlah sesuatu yang terberikan dalam bentuk yang relatif tetap, melainkan bersifat luwes dengan batas-batas ruang dan waktu yang tidak jelas. Dengan adanya kontak antarberbagai masyarakat, sulit untuk mengatakan lagi bahwa pengetahuan X adalah milik masyarakat X; atau sebaliknya, masyarakat Y adalah mereka yang memiliki pengetahuan Y. Pengetahuan terbentuk dan dimodifikasi dalam praktek keseharian yang bisa melibatkan berbagai pihak di luar masyarakat yang bersangkutan, walau prosesnya tidak akan selalu cepat untuk masing-masing individu. Dalam kerangka pemikiran yang diajukan Strauss dan Quinn (1997), interpretasi individu terhadap suatu gejala merupakan hasil interaksi antara dua jenis struktur yang berbeda hakekatnya, yaitu struktur-struktur intrapersonal yang bersifat mental, dan struktur-struktur ekstrapersonal yang berupa kejadian-kejadian nyata yang relatif stabil di sekitar individu (Strauss dan Quinn 1997:6). Kerangka pemikiran mereka menjelaskan tindakan manusia dengan memperhatikan apa yang menjadi pengetahuan individual, sekaligus dengan melihat keteraturan-keteraturan yang ada dalam kehidupan sosial.

Mengikuti apa yang dikatakan oleh Bourdieu (1990) tentang *habitus*, maka Strauss dan Quinn (1997:122) melihat bahwa selama individu-individu mengalami kejadian-kejadian yang mengikuti pola-pola yang kurang lebih sama, maka mereka akan belajar untuk membentuk skema-skema yang sama dalam menginterpretasi situasi-situasi yang mereka hadapi. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa skema bisa dimiliki bersama. Skema itu sendiri berupa pengombinasian berbagai unsur pengetahuan dan perasaan individual yang dipakai untuk

memproses informasi (Strauss dan Quinn 1997:49). Masalah unsur mana saja yang dikombinasikan adalah sesuatu yang dipelajari individu, sehingga kita bisa memahami bagaimana pengetahuan yang sama bisa membawa skema-skema yang berbeda dari satu individu ke individu yang lain, maupun dari situasi ke situasi.

Teori skema⁴ membantu dalam menjelaskan daya-daya sentripetal dan sentrifugal⁵ dalam kehidupan sosial. Daya sentripetal menyangkut masalah bagaimana kebudayaan bertahan dan direproduksi, baik selama kehidupan idividu maupun antargenerasi. Sebaliknya, daya sentrifugal menyangkut kecenderungan-kecenderungan timbulnya variasi antarindividu atau antarwaktu (perubahan). Mengapa ada individu-individu atau kelompok yang secara konsisten mempraktekkan hal-hal tertentu dalam kondisi-kondisi sosial dan fisik yang berubah dan kadangkala merugikan mereka? Mengapa ada individu atau kelompok lain yang berubah?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut proses belajar yang dialami individu, suatu proses yang sangat rumit. Namun, hal yang ingin ditekankan dalam artikel ini adalah bagaimana proses belajar ini sangat terkait pada pengamatan dan pengalaman langsung, dan sedikit sekali berupa hasil peng-

⁴ Teori skema yang diajukan oleh Strauss dan Quinn (1997) banyak mengambil dari pendekatan *connectionism* yang berkembang dalam bidang *artificial intelligence*. Pada dasarnya, Strauss dan Quinn telah memodifikasi teori *behaviorialistic* klasik dan memadukannya dengan pendekatan-pendekatan ideasional. Setiap rangsangan yang diterima individu akan mengaktifkan pengetahuan-pengetahuan dan perasaan-perasaan tertentu, dan meredam yang lainnya, sehingga terbentuklah skema untuk menginterpretasi rangsangan tersebut.

⁵ Penjelasan istilah-istilah sentripetal dan sentrifugal dalam artikel ini mengacu pada Strauss dan Quinn (1997) yang mengikuti pemikiran Bakhtin.

ajaran yang bersifat formal (lihat Strauss dan Quinn 1977 dan Bourdieu 1990). Proses belajar ini bersifat *trial and error*, sehingga tidak semua yang diamati dan dialami pada masa lalu menjadi bagian dari skema dalam memahami dan bertindak terhadap situasi baru. Skema-skema tertentu bertahan karena ‘berhasil’ membantu individu untuk memahami dengan baik sebuah situasi, atau memungkinkannya mengatasi suatu masalah. ‘Keberhasilan’ ini juga menyangkut perolehan dukungan sosial yang positif, dalam arti ada kesesuaian antara skema yang terbentuk (yang mungkin masih bersifat individual) dengan aturan-aturan yang memang sudah berlaku umum. Ostrom (1992:19) mengartikan aturan-aturan ini sebagai berikut:

...institution is simply the set of rules actually used (the working rules or rules-in-use) by a set of individuals to organize repetitive activities that produce outcomes affecting those individuals and potentially affecting others. ... Working rules are used to determine who is eligible to make decisions in some arena, what actions are allowed or constrained, what procedures must be followed, what information must or must not be provided, and what costs and payoff will be assigned to individuals as a result of their actions.

Pengembangan kedua aspek itu secara bersamaan memang memerlukan suatu upaya yang sungguh-sungguh berlandaskan pendekatan yang tepat. Terutama, dalam situasi amat beragamnya kondisi masyarakat, habitat, strategi pengelolaan sumberdaya alam oleh penduduk setempat dengan intervensi ‘program-program pembangunan berorientasi produksi dalam wujud proyek’. Hegemoni ilmu pengetahuan ilmiah atas domain pengetahuan lokal pun kuat mewarnai aneka ragam teknologi yang dikembangkan yang belum tentu ‘ramah lingkungan’. Belum pula hadirnya sejumlah pelaku dengan tujuan produksi untuk kepentingan ekonomi semata-mata. Dalam situasi yang kompleks ini, bagaimanakah

pendampingan ke arah itu memungkinkan?

Tulisan ini akan mengangkat sejumlah kasus yang menunjukkan kondisi yang ber variasi dalam hal masalah lingkungan hidup yang dihadapi, sejauhmanakah masalah itu ditemukan dan mengumpulkan balik pada pengetahuan dan perilaku penduduk setempat, kondisi pengetahuan ekologi serta pranata sosial komunitasnya, dan implikasinya pada kondisi habitat yang dikelolanya. Empat kasus yang diangkat dalam makalah ini merupakan kasus-kasus yang diamati dalam penelitian di kawasan pesisir Sulawesi Selatan,⁶ dan di antara petani padi/palawija di Lampung Tengah yang menerima pendampingan dalam program Pengendalian Hama Terpadu (PHT).⁷ Dua kasus di lokasi yang berbeda di pesisir Sulawesi

⁶ Penelitian di Pesisir Sulawesi Selatan diawali dengan suatu penelitian pendahuluan di tiga lokasi, yakni Paojepé, Boneputé, dan Tongke-tongke pada bulan Oktober 1998-Januari 1999 oleh tim lintas disiplin Jurusan Antropologi FISIP-UI dan Litbang Botani, LIPI – Bogor dengan bantuan dana dari UNESCO-MAB Program. Data yang disajikan dalam makalah ini didasarkan pada hasil penelitian pendahuluan tersebut yang dilengkapi oleh data hasil penelitian lanjutan oleh personel yang berbeda dengan bantuan dana dari The MacArthur Foundation. Terima kasih pada UNESCO-MAB Program, The MacArthur Foundation dan para peneliti: J. Purwanto, Aboel Qasim, Burhanuddin Gala, Munsi Lampe dan sejumlah peneliti pengganti dalam program penelitian lanjutan.

⁷ Salah satu program nasional yang berskala luas dan memerlukan dana operasional yang amat besar, Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sejak awal 1990, sudah ‘mendunia’ dengan kegiatan ‘Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu’ (SLPHT). Berbagai ‘kisah sukses’ telah mengiringi program ini hingga satu dasa warsa berlalu (see Dilts dan Hate 1996; Kenmore 1997). Program utamanya adalah pengalihan pengetahuan dan strategi PHT pada berbagai komunitas petani yang tersebar di berbagai wilayah Indoensia. Data yang disajikan dalam makalah ini bersumber dari penelitian di sejumlah desa di Lampung Tengah pada tahun 1998-1999 yang didukung oleh The Indonesian—FAO—Inter Country Program. Terima kasih pada FAO dan para peneliti: Fadli, A. Sri Handayani Ningsih dan S. Darmono.

Selatan merupakan kasus yang saling bertolak belakang dalam hal kemampuan penduduk setempat untuk mengembangkan strategi pengelolaan habitatnya, yang sama-sama ‘rusak’ oleh konversi mangrove menjadi areal pertambakan. Kasus di Lampung Tengah pun menunjukkan fenomena yang berbeda dalam hal kemampuan petani menginternalisasikan strategi PHT yang diintroduksikan pada mereka. Kondisi yang bervariasi dalam hal pengembangan pengetahuan ekologi serta pranata sosial di masing-masing lokasi diharapkan menyajikan pemahaman yang bermanfaat bagi perkembangan wacana serta pemikiran tentang strategi pendampingan bagi kasus-kasus serupa di masa datang. Bagian akhir dari tulisan ini akan mengulas alternatif pendekatan dalam membantu penduduk setempat mengelola sumberdaya alamnya secara tangguh dan berkelanjutan.

Menyadari degradasi, tiada solusi: kasus abrasi kawasan pesisir di Paojepe

Kasus abrasi di Paojepe dan beberapa tempat lain di kawasan pesisir Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang telah dikembangkan strateginya oleh penduduk setempat dalam mengonversi kawasan pesisir menjadi tambak didasarkan atas kepentingan ekonomis, dan tidak didasari oleh pemahaman ekologis yang mendalam atas kondisi ekosistem pesisir. Berbagai faktor kontekstual mempengaruhi pengelolaan sumberdaya yang terbuka perolehannya itu (lihat Winarto dkk. 1999; Prioharyono dkk. 2000). Dalam beberapa tahun terakhir, dengan terjadinya abrasi yang meningkat, para petambak menyadari adanya ancaman terhadap lahan usahanya. Risiko yang semakin tinggi telah mengumpam balik pada pengetahuan mengenai dampak dari usaha yang dilaksanakan. Namun, pola strategi pengelo-

laan sumberdaya alam tidak mengalami perubahan. Mereka seakan tidak mengetahui apa solusi yang harus ditempuhnya. ‘Kebudayaan pengelolaan tambak’ yang dibawa dari tempat asalnya, tetap bertahan dalam cara yang telah dikembangkan selama ini yang tidak mendukung keberlanjutan/ketangguhan ekosistem. Kebudayaan ‘lama’ pun bertahan (menunjukkan daya sentripetal seperti dikemukakan Strauss dan Quinn 1997), sekalipun dampak dari interaksi dengan relungnya telah mengumpam balik pada pengetahuan mereka. Kekhawatiran atas risiko hilangnya investasi atas lahan tambak mereka dengan hancurnya lahan oleh abrasi telah menjadi bagian dari *‘perceived risk and benefit’* mereka. Tetapi, mengapa mereka seakan membiarkan abrasi tetap terjadi? Dalam situasi ini, pranata sosial yang ada tidak mendukung pembentukan pengetahuan tentang perlunya pengembangan aturan-aturan dalam mengatasi terjadinya abrasi secara kolektif. Mengapa? Pengelolaan tambak secara individual, dengan kerja sama kolektif dalam hal-hal tertentu saja, minat ekonomi yang tinggi, ketidakpermanenan usaha dan tempat tinggal mereka merupakan bagian dari faktor penjelas. Dari beberapa kasus pendampingan dan upaya penanaman kembali tanaman bakau untuk pencegahan abrasi masih patut diperintahkan: sejauhmanakah upaya pendampingan yang dilakukan telah merintis pada penciptaan pranata sosial yang mendukung, ataukah terutama pada rekayasa teknologi semata?

Praktek-praktek yang merusak lingkungan bertahan karena dalam proses pembentukan skema yang memotivasi praktik tersebut, pengetahuan tentang kerusakan lingkungan tidak diaktifkan oleh rangsangan yang mereka terima. Ini tidak berarti bahwa petani tambak tidak mempunyai pengetahuan sama sekali tentang kerusakan lingkungan tersebut; hanya

saja mereka belum belajar mengombinasikan pengetahuan tersebut bersama dengan pengetahuan lain yang membentuk skema tersebut. Praktek selama ini kurang dapat mendukung proses belajar ini, dan seringkali justru mendorong terbentuknya asosiasi-asosiasi pengetahuan yang lain. Sebagai contoh, upaya penanaman bakau tidak dianggap sebagai ‘kepentingan bersama’ oleh sebagian penduduk yang bukan petambak. Dalam kondisi seperti ini, keterlibatan mereka dalam upaya penanaman kembali diusahakan dengan menjanjikan imbalan uang (Prioharyono dkk. 2000:74). Semakin seringnya hal ini terjadi, semakin kuatlah asosiasi antara penanaman bakau dan keuntungan ekonomi dalam pembentukan skema. Tanpa adanya kemungkinan memperoleh keuntungan, maka skema yang terbentuk akan berbeda: ‘...untuk apa menanam bakau?’

Bagi petani yang berhadapan langsung dengan masalah abrasi, skema yang diharapkan juga sulit terbentuk. Strauss dan Quinn menyebutkan bahwa pembentukan skema terdorong oleh usaha pemecahan masalah (*task solutions*) yang bisa menjadi *shared task solutions* bila skema tersebut sudah banyak yang mengikuti. Namun demikian, masalah tidak berdiri sendiri, sehingga sebuah skema bisa terbentuk untuk memahami dan mencari pemecahan beberapa masalah sekaligus (Strauss dan Quinn 1997:121, 125). Tampaknya, skema yang ada pada petambak ini bukan saja bermotif ekonomi, namun juga terkait dengan dorongan keagamaan yang kuat untuk menuaikan ibadah haji (Prioharyono dkk. 2000:62). Walaupun sadar akan kerusakan yang terjadi pada tambaknya, dan mungkin juga bagaimana mengatasinya, skema untuk melakukan penanaman tidak mempunyai daya motivasi yang kuat bila masalah utama yang dihadapi telah teratasi.

Bagi sejumlah kecil petambak yang telah mulai mencoba menanam kembali bakau di lahannya, masalah yang dihadapi adalah tidak adanya aturan-aturan yang melindungi bakau yang telah tertanam. Kondisi ekonomi mereka hanya memungkinkannya menanam dalam skala kecil, namun ini pun rentan terhadap pengambilan oleh pihak lain karena lahan mangrove dianggap sebagai *open access resources* (Prioharyono dkk. 2000:76-77). Dukungan positif dari lingkungan sosial juga tidak tampak bagi mereka yang menanam. Tidak adanya ‘kepentingan bersama’ seperti yang telah disebutkan di atas menyebabkan penanam bakau bekerja sendiri. Jalan keluar dari masalah-masalah yang ditemui di Paojepe memang rumit. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa daya sentrifugal kebudayaan di antara penduduk setempat ada; artinya ada potensi untuk perubahan. Namun, segala pengetahuan yang sudah ada pada masyarakat setempat, serta pembentukan skema-skema yang mendukung pelestarian lingkungan mereka, akan sulit bertahan tanpa adanya pranata-pranata sosial yang mendukung dipelajarinya, atau diinternalisasikannya skema-skema tersebut.

Mengenali solusi, tiada dukungan institusi: kasus PHT ‘Program Nasional’ di Batanghari

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah dengan bantuan mitra dari lembaga internasional (ilmuwan dan lembaga donor) serta ilmuwan dalam negeri telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengatasi serangan hama yang beruntun. Serangan hama ini mengganggu pencapaian target produksi pangan secara nasional, dan terlebih lagi, mengancam swa sembada beras yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984. Ditetapkanlah Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu sebagai program nasional untuk

mengubah paradigma dan perilaku petani dari ketergantungan pada pestisida sebagai solusi penanggulangan hama, ke pengelolaan ekosistem untuk memproduksi tanaman sehat berdasarkan analisis agro ekosistem.

Perubahan paradigma petani itu diharapkan tercapai melalui pelatihan-pelatihan dalam SLPHT (Lihat FAO 1990; Fox 1991; The Indonesian IPM Program n.d.), yang ditujukan pada pengayaan dan perubahan pengetahuan petani-petani individual yang direkrut dalam SLPHT. Diharapkan oleh para perancang program bahwa para petani yang dilatih ini dapat menyebarluaskannya pada sesama petani (lihat misalnya van de Flriet 1993; Winarto 1996; Röling dan van de Flriet 1998). Ledakan-ledakan hama, khususnya wereng coklat, telah merisaukan petani sejak mereka menanam padi unggul (padi ‘pemerintah’, atau padi ‘pendek’). Namun, solusi yang mereka kenali adalah penggunaan pestisida sebagaimana diperkenalkan oleh para petugas pertanian. Bahwasanya semakin banyak pestisida digunakan, semakin rentanlah kondisi ekologi lahan mereka oleh musnahnya predator hama dan semakin keballah hama, berada di luar kemampuan pengamatan dan pengetahuan petani. Pemahaman petani bahwa pestisida sebagai satu-satunya alternatif pengendalian hama telah memiliki daya ‘sentripetal’ selama tiga dasa warsa.⁸

Dari hasil pengamatan sejak awal mula diperkenalkannya program ini (sejak tahun 1990), introduksi pengetahuan dan prinsip PHT itu dilaksanakan berbarengan dengan masih

dilaksanakannya paradigma pembangunan pertanian yang mengadopsi program ‘Revolusi Hijau’ (*Green Revolution*) dengan penekanan utama pada peningkatan produksi melalui rekayasa teknologi. Dalam berbagai introduksi paket-paket teknologi dan rekomendasi selama tiga dekade terakhir, pemberian institusi sosial dilaksanakan melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha tani untuk menunjang pengadopsian dan penyebarluasan program ini, serta untuk mempermudah jalur distribusi pasokan melalui kredit-kredit usaha tani. Kelompok-kelompok tani semacam ini terutama berfungsi hanya sebagai penyalur kredit tersebut, dan tidak benar-benar mengakar dalam hal perajutan pranata sosial. Ketika program nasional PHT dicanangkan dan disebarluaskan, pemberian pranata sosial petani yang telah direkayasa pemerintah selama tiga dekade tersebut belum atau tidak tertangani secara seksama. Terlebih lagi, situasi yang dihadapi petani tidaklah menguntungkan dalam hal masih terlaksananya kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan produksi pangan dengan pola pendekatan ‘dari atas’ melalui berbagai ‘rekomendasi, instruksi’ yang acapkali diiringi dengan ‘ancaman secara halus’ (intimidasi) atau bahkan, terang-terangan. Dukungan institusi dan situasi sosial bagi petani dalam melaksanakan prinsip dan strategi PHT secara konsekuensi pun kurang terciptakan. Kasus di antara petani-petani PHT pada tahun-tahun pertama program ini diperkenalkan, seperti di Pantai Utara Jawa Barat menunjukkan bahwa para alumni PHT haruslah berjuang seorang diri, atau dalam kelompok-kelompok yang kecil, dalam mencoba-baterapkan pengetahuan baru yang diperolehnya. Hal itu tidaklah mudah dilaksanakan sejumlah kecil petani (sekitar 25 orang) di antara ratusan petani yang tidak/belum mengenali skema interpretasi yang baru tersebut dalam mengenali gejala

⁸ Pihak ilmuwanlah yang menemukan sumber masalah peledakan hama wereng ini. Hasil ujarnya yang memperkaya pengetahuan ilmuwan inilah yang kemudian dialihkan pada petani setelah dilaksanakan ‘lobi’ oleh para ilmuwan (luar dan dalam negeri) dengan bantuan sejumlah ‘elit politik’ pada puncak pimpinan negara. ‘Lobi’ inilah yang menghasilkan dikeluarkannya Inpres no. 3/1986 yang terkenal dalam pencanangan PHT sebagai program nasional pengendalian hama

serangan hama dan penang-gulangannya (lihat Winarto 1996). Pengenalan masalah dan solusinya baru teradopsi oleh sebagian kecil saja petani yang ‘beruntung’ memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai PHT itu baru berlangsung dalam diri individu-individu dan belum menjadi milik bersama oleh sebagian besar warga komunitas petani. Karena itu pemantapan pemahaman baru itu dalam diri individu sehingga mampu menjadi kekuatan pengubah perilaku belum terlaksana, karena kondisi eksternal yang kurang menunjang. Ternyata, setelah hampir satu dasa warsa berlalu, hal serupa masih dijumpai penulis di sejumlah lokasi yang lain seperti di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Tengah di tahun 1998-1999; sekalipun pernah dilaksanakan beberapa kali program pelatihan dalam wujud Sekolah Lapang (‘sekolah tanpa dinding’) di suatu lokasi (Dusun 40 Polos, Desa Balerejo). Upaya dilakukan untuk memperkaya dan mengubah pengetahuan sekelompok petani tanpa penanganan pranata sosialnya, dan dilakukan hanya dalam periode singkat (satu musim tanam) tanpa ada kegiatan tindak lanjut untuk mendampingi para ‘alumni PHT’. Konsekuensinya, pengetahuan yang diintroduksikan itu belum mampu mengubah skema interpretasi yang telah sedemikian kuat melandasi persepsi mereka dalam penanggulangan hama. Hal itu dijumpai penulis di dua lokasi di Kecamatan Batanghari (Desa Selorejo dan Bumi Mas). Sejumlah petani kembali ke strategi pengendalian hama secara konvensional, karena apa yang mereka peroleh dari pelatihan dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru mereka ‘ketahui’, tetapi belum ‘dibuktikan kebenarannya’ atau ‘dipraktekkan’. Apalagi bila terjadi serangan hama yang cukup intens, maka strategi pengendalian hama dengan pestisida masih menjadi solusi utama, ditunjang

oleh rekomendasi dan instruksi aparat pertanian dan pamong setempat. Sejumlah petani yang lain baru dalam tahap uji-coba mengembangkan strategi alternatif yang belum tentu selalu berhasil (Winarto dkk. 2000).

Di sinilah nampak daya ‘sentripetal’ dari kebudayaan, yaitu bertahannya pemahaman-pemahaman budaya ‘bercokok tanam’ dalam diri individu yang diinternalisasikannya selama tiga dasa warsa. Harapan bahwa hanya dengan diintroduksikannya pengetahuan baru para petani lalu dapat ‘mengubah’ persepsi dan skema interpretasi yang telah diinternalisasikannya selama ini, ternyata tidak terwujud secara mudah. Daya ‘sentrifugal’ dari kebudayaan, atau selanjutnya: kemampuan bahwa pemahaman baru itu dapat bertahan dalam diri individu dan memotivasi perilakunya, menjadi kurang efektif tanpa dukungan institusi sosial dan kondisi eksternal yang menunjang. Misalnya, tidak dikenalinya pemahaman baru itu oleh sebagian besar petani yang lain; dan tidak terciptakannya norma-norma sosial dan evaluasi atas dasar kekonsistennan dalam pengetrapan strategi PHT. Evaluasi tetap ditujukan pada keberhasilan panen, sekalipun petani menggunakan pestisida. Hasil interaksi dengan kondisi lingkungan pun acapkali kurang menunjang. Hasil panen yang memuaskan belum tentu dapat diperoleh. Kondisi iklim/cuaca tidak selalu mendukung tumbuhnya tanaman dengan baik; serangan hama/penyakit pun datang beruntun, dll. Dukungan secara kolektif yang terorganisasikan bagi kekonsistennan petani dalam mengubah strategi pengendalian hama, terutama bila menghadapi serangan hama yang intens dan berbagai ‘rekomendasi’ dari pihak-pihak luar tidak terwujud.

Hasil nyata dari pengetrapan pengetahuan yang baru memang dirasakan oleh sebagian petani PHT, seperti yang terjadi di antara sejumlah petani PHT di Desa Balerejo (yang telah mengikuti pelatihan beberapa kali dalam

beberapa tahun berurutan). Pemahaman mereka memang berubah dengan dikenalinya konsep-konsep dan proposisi-proposisi baru, serta alternatif-alternatif pengendalian hama non-kimiawi. Tetapi, perubahan ‘budaya berco-cok tanam dari panen-dengan-pestisida menjadi panen-tanpa-pestisida’ dari sebagian besar warga komunitas petani setempat belumlah terlaksana. Penyebarluasan pengetahuan dan strategi baru melalui mekanisme transmisi pengetahuan para petani itu sendiri menuntut pembuktian yang tidak selalu mudah diberikan oleh para petani PHT. Terutama, dalam situasi budi daya tanaman pangan yang amat kompleks dan ‘terbuka’ untuk berbagai pengaruh yang sulit dilacak dan dibuktikan hubungan sebab-akibatnya secara empiris. Karena itu, mengenali solusi bagi masalah pengelolaan sumberdaya alam tanpa ditunjang oleh penciptaan institusi sosial tidaklah efektif dalam mengubah kebudayaan cocok tanam petani dengan menginternalisasi-kan pemahaman-pemahaman budaya yang baru, dan mempertahankannya. Situasi yang berbeda dijumpai penulis di sejumlah komunitas petani yang lain yang memperoleh pendampingan yang sungguh-sungguh, tidak hanya dalam upaya perubahan pengetahuan, tetapi juga penciptaan institusi. Lebih efektifkah perubahan yang terjadi?

Membina diri, merajut institusi: kasus PHT ‘binaan Lembaga’ di Karang Endah

Kelemahan-kelemahan dari Program Nasional PHT yang seakan sebagai suatu ‘pesta’ (akronim dari ‘tipis-tipis tapi merata’) dicoba untuk dihindari, dan diupayakan secara sungguh-sungguh untuk dibenahi oleh komunitas petani yang memperoleh pendampingan dari LSM di Karang Endah, Lampung Tengah. Karena itulah para petani sendiri

membedakan programnya dari Pronas (akronomi dari Program Nasional) dengan program yang ‘serius’, tidak sekedar ‘pesta’, karena ‘kualitas’lah yang diutamakan dan bukan ‘kuantitas’. Terbersit dari penggunaan istilah ‘kualitas’ yang dibedakan dari ‘kuantitas’ ini adalah harapan para petani pengelola program itu untuk mencapai hasil berupa perubahan pengetahuan dan perilaku petani PHT, serta mampu menginternalisasikan perangkat pengetahuan dan paradigma baru; dan bukan hanya sekedar ‘tahu’. Mereka menyadari bahwa pengalihan pengetahuan hanya satu kali selama satu musim tanam, tanpa pendampingan pada tahap selanjutnya, tidaklah memiliki daya guna efektif dalam memotivasi petani untuk mengubah perilakunya dan memantapkan pengetahuan yang telah dimiliki. Kekonsistennan tidak akan tercapai tanpa upaya pendampingan terus menerus. Hal itu mengindikasikan bahwa para petani sendiri mampu belajar dari pengalaman dan pengamatan untuk mencari solusi, agar ada mekanisme yang tercipta yang mampu mendorong bekerjanya kedua macam kekuatan. Tidak hanya daya ‘sentrifugal’ dalam diri individu-individu untuk mengubah pemahaman budaya yang tidak menunjang, tetapi juga daya ‘sentripetal’, yakni mempertahankan pemahaman baru yang diinternalisasikannya dalam situasi apa pun.

Sekalipun mereka mengadopsi program dan metode pelatihan SLPHT yang dikembangkan oleh ‘Pronas’, tetapi perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dibenahi. Untuk itu, mereka membentuk suatu organisasi. Dengan pendampingan oleh LSM, mereka pun mulai merajut ‘institusi’. Misalnya, mekanisme dan aturan main bagi perekutan petani pemandu, tata cara persiapan dan pelaksanaan suatu program pelatihan, program dan tata laksana pendampingan kegiatan uji-coba yang oleh

petani disebut dengan ‘studi-studi petani’ atau ‘sains petani’, mekanisme evaluasi dan monitoring pelbagai kegiatan di antara para pengurus organisasi, dll. Sasaran yang ingin dicapai memang perubahan pengetahuan dan perilaku petani, terutama bagaimana mereka mampu menghasilkan produk pangan ‘bebas racun’. Hal itu dibuktikan melalui uji coba terus menerus dalam membudidayakan tanaman kedelai yang pernah gagal dibudidayakan di wilayah mereka, dan karenanya, telah ditinggalkan oleh sebagian besar petani. Keberhasilan mereka untuk membudidayakan benih kedelai berkualitas serta membuat panen kedelai ‘bebas racun’ memberikan umpan balik bagi pengendapan pengetahuan yang diperoleh di antara para petani PHT. Tidak hanya itu, keberhasilan itu pun secara sengaja maupun tidak sengaja tersebar luas di antara para petani di berbagai wilayah yang lain.

Penyelenggaraan program-program pelatihan yang diupayakan untuk dapat terus dilaksanakan di berbagai kelompok tani yang belum memperoleh pelatihan secara bergiliran dari tahun ke tahun mempermudah penyebarluasan pengetahuan dan strategi baru ini. Kegiatan berupa ‘studi-studi petani’ yang dilakukan juga merupakan arena pengamatan bagi petani lain yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan. Upaya-upaya ini memungkinkan lebih banyaknya individu petani yang mengenali dan memahami paradigma baru ini dalam waktu relatif lebih singkat daripada yang terjadi di antara komunitas petani binaan ‘Pronas’. Hal itu menciptakan situasi yang mendukung bagi bekerjanya ‘daya sentrifugal’ dari pemahaman-pemahaman budaya dalam diri petani. Pemahaman yang diikuti dengan umpan balik, evaluasi, pembuktian, serta tersedianya ‘tempat-tempat bertaunya/berkonsultasi’ dalam situasi ketidakpastian dan ketidakterdugaan, merupakan suatu proses

yang mempermudah terjadinya perubahan pengetahuan dan perilaku.

POSKO, atau kantor/sekretariat Lembaga, yakni ruang bekerja yang digunakan sebagai ‘kantor’ sekaligus ‘tempat pertemuan dan diskusi pengurus dan para petani’, menjadi tempat yang efektif bagi berkembangnya berbagai gagasan petani serta bergulirnya wacana dan program-program baru. Bahkan, tempat itu pun (berupa ruang tamu yang disewa dari salah seorang petani pemandu) menjadi ajang ‘konsultasi’ para petani. Secara tidak langsung, akses pada perolehan pengetahuan dan informasi diciptakan, yakni perolehan melalui komunikasi dengan para pengurus lembaga dan petani pemandu yang dapat dihubungi di Posko tersebut atau pun di berbagai arena temu petani dan kegiatan pelatihan. Mereka pun mampu mengembangkan kepercayaan dirinya sebagai sumber informasi, karena diperolehnya informasi itu melalui hasil temuan dan studi-studi yang dilakukannya. Pelaksanaan studi-studi sebagaimana penelitian yang dilakukan ilmuwan telah terinternalisasi sebagai bagian dari mekanisme perolehan pengetahuan, terutama di antara para alumni PHT.

Sekalipun kebijakan pemerintah dalam produksi pangan dan berbagai masalah yang tidak terduga (seperti perubahan kondisi iklim, naiknya harga-harga pasokan pertanian seperti pupuk dan pestisida, ledakan hama dan penyakit secara tiba-tiba) juga dialami warga komunitas ini, tetapi dengan penguatan ‘instisi’, kemampuan untuk secara lebih konsisten menerapkan paradigma yang baru lebih mengemuka. Upaya untuk tidak menggunakan pestisida sejauh hal itu memungkinkan akan dilaksanakan oleh mereka yang telah memperoleh ‘keyakinan’ atas manfaat paradigma yang baru ini. Mereka merasa lebih percaya diri untuk berkata ‘tidak’ bila kebijakan itu menuntut mereka untuk kembali ke strategi

‘panen-dengan-pestisida’. Contoh lain adalah kemampuan mereka untuk menggalang kerja sama untuk secara kolektif menyuarakan ketidaksetujuan atau keluhan-keluhan mereka pada aparatur birokrat juga terwujud melalui pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sekalipun wujud organisasi yang digunakan adalah hasil rekayasa selama rezim Orde Baru, tetapi inisiatif dan kerja sama yang tergalang untuk ‘menggabungkan’ diri menjadi suatu kekuatan yang lebih besar dan efektif, terbukti dapat dilakukan petani. Mekanisme untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja sama seakan sudah lebih ‘tertata’ ketimbang para petani di lokasi binaan ‘Pronas’ (lihat Winarto dkk. 2000; Winarto 2000).

Kasus ini hanyalah sekedar contoh bagaimana pembinaan diri, perkembangan pengetahuan, dan perubahan perilaku itu terjadi sebagai hasil upaya penggarapan dalam memperkaya dan mengubah pengetahuan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam suatu wadah yang memungkinkan hal itu terwujud. Pemahaman dalam diri individu terbentuk secara lebih mantap, dan pemahaman baru dalam lingkup komunitas pun berlangsung secara gradual. Walau demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pun masih dijumpai para ‘pengurus lembaga’, yakni ketidakmampuan mereka untuk secara serta merta mengubah pengetahuan dan perilaku ribuan petani yang masing-masing adalah ‘manajer’ di lahannya sendiri. Hak masing-masing individu untuk mengambil keputusan adalah hak yang harus mereka hormati. Kenyataan bahwa ada sejumlah petani yang ‘tahu’ apa itu PHT, tetapi yang secara sadar ‘menolak untuk mengetarkan strategi itu’ di lahannya sendiri merupakan bukti bahwa merajut institusi sosial dalam konteks masyarakat yang mengakui ‘hak kepemilikan individual’ (*individual/private property*) itu merupakan suatu tantangan yang

tidak mudah. Sebagai perbandingan, kasus petambak di Tongke-tongke, Sulawesi Selatan merupakan suatu kasus yang menarik dari kemampuan penduduk setempat itu sendiri untuk tidak hanya menciptakan kembali ‘relung’ yang pernah ‘hilang’, tetapi juga merajut institusi dan tradisi dari konteks pengelolaan sumberdaya yang ‘terbuka perolehannya’ menjadi yang ‘pribadi’ sifatnya. Bagaimanakah hal itu terwujud?

Mencipta relung, institusi dan tradisi: kasus rehabilitasi ekosistem mangrove di Tongke-tongke

Kasus rehabilitasi kawasan pesisir di Tongke-tongke, Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penduduk setempat itu sendiri mampu untuk mencari solusi melalui tindakan dan temuan guna mengatasi ancaman bahaya di lingkungan tempat tinggalnya. Para nelayan melihat dan mengenali ancaman abrasi, serta meresponsnya dengan mengupayakan rehabilitasi lahan melalui penanaman bakau. Hasilnya adalah penciptaan suatu ‘relung’ yang baru, suatu ekosistem mangrove yang kembali dipulihkan. Hal itu ditunjang oleh situasi adanya kebutuhan perolehan lahan bagi migran yang menetap tetap, minat ekonomi dan *perceived benefits* yang diharapkan dapat diperoleh dari penanaman kembali tanaman bakau, adopsi yang secara relatif ‘cepat’ dilaksanakan oleh sesama warga nelayan, serta dukungan pihak pemerintah. Semuanya itu terlaksana oleh inisiatif nelayan itu sendiri untuk mengembangkan aturan-aturan tentang siapa dapat menanam bakau di mana, bagaimana pengalihan lahan dapat/tidak dapat dilakukan, strategi peroleh sumberdaya alam dari lahan mangrove yang tercipta, dsbnya.

Lahan pesisir di Tongke-tongke semula merupakan milik kelompok bangsawan. Namun, ketika lahan yang mereka manfaatkan sebagai

tambak mulai terkena abrasi, maka para bangsawan itu melepaskan hak mereka atas tanah tersebut dengan cara membiarkannya saja dan tidak membayar pajak lagi. Lahan yang jatuh ke tangan negara dianggap oleh penduduk setempat sebagai lahan terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk secara individu. Perolehan lahan oleh individu dilakukan dengan membuat *claim* atas bidang tanah yang ia inginkan. Caranya adalah dengan menanam bakau pada bidang tanah tersebut. Dalam situasi di mana pertambahan penduduk mulai tidak seimbang dengan lahan yang tersedia, maka individu yang membutuhkan lahan mulai menanam bakau semampunya, dengan harapan bahwa tanah yang telah ia tanami diakui sebagai miliknya.

Harapan ini tentu tidak akan terwujud apabila individu bekerja sendiri. Dalam masyarakat Tongke-tongke telah berkembang aturan-aturan mengenai penanaman bakau dan hak atas tanah. Seseorang hanya boleh mulai menanam bakau di lahan yang benar-benar kosong. Siapa pun tidak diperkenankan menanam di lahan yang telah ditanami orang lain; mereka juga tidak boleh memanfaatkan tanaman bakau atau apa pun yang berdiri di atas lahan orang lain tanpa seizin orang yang telah menanam di lahan tersebut. Aturan-aturan ini telah begitu berkembang sehingga menyangkut pula masalah pewarisan tanah.

Sejauh ini, pengakuan atas kepemilikan tanah memang sebatas pengakuan dari masyarakat desa saja. Harapan bahwa pemerintah akan mengeluarkan sertifikat atas tanah yang telah ditanami belum terwujud, walaupun hak pengelolaan atas tanah tersebut sudah diakui. Sekalipun demikian, penanaman terus berlanjut. Penduduk Tongke-tongke menanam bakau sebagai usaha untuk mereklamasi lahan yang telah terkikis laut. Bakau ditanam secara bertahap menuju arah laut. Bila bakau yang ditanam sudah menguat, maka bibit baru

ditanam di depannya ke arah laut. Apabila bakau yang ditanam telah mencapai kedalaman yang cukup, maka tanaman yang terletak di bagian belakang ditebang, dan lahannya dibuka untuk tambak. Sementara itu, hutan mangrove yang menjorok ke laut dipertahankan untuk melindungi tambak yang baru saja dibuka (Prioharyono dkk. 2000:149).

Strategi reklamasi dan pembukaan lahan seperti ini diperoleh penduduk Tongke-tongke dari pengamatan mereka terhadap praktek orang-orang Desa Pangasa'. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa solusi penduduk Tongke-tongke atas masalah keterbatasan lahan dan sumber daya bukanlah sebuah solusi yang lahir dari mereka sendiri. Akan tetapi, pernyataan seperti ini sangat menyederhanakan masalah. Hal yang perlu ditekankan dalam kasus Tongke-tongke adalah bahwa strategi penanaman dan pengelolaan hutan mangrove yang mereka jalankan dapat berkembang karena mereka juga telah mengembangkan aturan-aturan sendiri menyangkut pemilikan dan pewarisan tanah, serta pemanfaatan sumber daya yang terdapat pada bidang tanah tersebut. Tanpa adanya pranata atau aturan-aturan ini, maka segala usaha penanaman bakau tidak menjadi *task solution* (memakai istilah Strauss dan Quinn) yang dapat mendorong terbentuknya skema interpretasi dan tindakan yang bertahan.

Penciptaan relung yang baru disertai dengan pranata sosial yang mereka kembangkan sendiri mengumpamkan balik pada pengetahuan dan tradisi baru dalam mengonservasi lahan mangrove. Konsekuensi lebih lanjut: pengetahuan penduduk mengenai ekosistem mangrove menjadi lebih kaya melalui umpan balik dari kondisi lahan mangrove yang tercipta. Manfaat dari kembalinya ekosistem mangrove itu dapat secara nyata mereka rasakan dan dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. 'Daya sentripetal' dari kebudayaan bekerja,

menguatkan skema-skema inter-pretasi dalam diri individu disertai perwujudan dalam praktik pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Ini merupakan contoh bagaimana penduduk setempat sendiri mampu melaksanakan pengaturan sendiri, menciptakan strategi-strategi konservasi dan kemudian memanfaatkan sumberdaya alam yang tercipta.⁹ Sekaligus, hal itu memperkaya pengetahuan lokal mereka mengenai kondisi dan manfaat ekosistem yang baru.

Kasus ini merupakan contoh bagaimana hal ini dilaksanakan para petambak sendiri tanpa pendampingan secara formal sebagaimana dialami para petani di Karang Endah. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa pendampingan tetaplah diperlukan.

Hubungan kemitraan: menuju pengelolaan sumberdaya berkelanjutan

Untuk memungkinkan terlaksananya pengelolaan sumberdaya alam yang tangguh dan berkelanjutan, potensi sebenarnya ada pada diri penduduk setempat itu sendiri. Namun, kondisi memang bervariasi dari satu lokasi ke

lokasi yang lain, dan variasi itu haruslah menjadi perhatian dan kajian seksama. Dalam kasus-kasus tertentu bila perubahan diperlukan untuk mengoreksi praktik-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang tidak tangguh dan berkelanjutan, maka kemungkinan-kemungkinan serta situasi perlu diciptakan agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya sendiri untuk melakukan perubahan. Hal ini memang tidak merupakan suatu hal yang mudah dilaksanakan, terutama dalam kasus-kasus adanya kompetisi perolehan sumberdaya di antara para penggunanya yang juga beragam.

Mengacu pada masalah pengelolaan sumberdaya alam, Sabatier (dalam Ostrom dkk. 1993) mengemukakan bahwa individu-individu diasumsikan memiliki alasan-alasan yang rasional. Dijelaskannya bahwa individu-individu selalu berupaya untuk memaksimalkan perolehan-perolehan materi dalam suatu dunia yang hanya memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi yang ‘tidak lengkap’ mengenai konsekuensi-konsekuensi dari perilaku-perilaku alternatif. Individu-individu diasumsikan sebagai memiliki minat perhatian untuk kepentingannya sendiri, dan juga cenderung untuk menjadi *free rider* dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi se-macam ini, Sabatier (dalam Ostrom 1993:xx) berkeyakinan bahwa individu yang sama akan berperilaku berbeda dalam situasi pengambilan keputusan yang berbeda. Berarti, perlu diciptakan situasi yang menyebabkan individu-individu mengambil keputusan strategi pengelolaan sumberdaya yang berbeda, yang dalam hal ini diharapkan merupakan strategi menuju pengelolaan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk itu, aturan-aturan institusional memainkan suatu peranan yang kritis dalam menentukan situasi-situasi pengambilan keputusan itu. Dalam hal inilah pengembangan institusi sosial diperlukan.

Beberapa kasus di atas menunjukkan

⁹ Ketika versi awal dari tulisan ini dipresentasikan dalam simposium di Makassar, Andi Amri, seorang peserta dari Universitas Hasanuddin yang mengikuti perkembangan paling akhir di Tongke-tongke, mengemukakan bahwa ada masalah-masalah baru yang muncul di Tongke-tongke, yang berkaitan dengan mekanisme kontrol sosial di antara penduduk. Menurutnya, ada indikasi bahwa aturan-aturan main yang telah disepakati tentang pemanfaatan sumber daya mulai dilanggar. Hal itu tampaknya disebabkan oleh kecemburuan beberapa pihak yang melihat bahwa berbagai bantuan dari luar (seperti persediaan bibit bakau) selalu diberikan melalui seorang tokoh masyarakat yang dianggap telah berhasil dalam penanaman bakauu, sehingga pihak-pihak tersebut mulai mencari keuntungan dengan cara-cara mereka sendiri. Di satu pihak, ini bisa menggambarkan lemahnya pranata sosial yang dibangun oleh masyarakat Tongke-tongke. Akan tetapi, di lain pihak, kejadian ini justru menggarisbawahi bahayanya intervensi pihak luar (donor maupun pihak-pihak lain) yang tidak memperhatikan kondisi-kondisi setempat.

bahwa upaya untuk menciptakan situasi pengambilan keputusan yang berbeda melalui pengembangan institusi sosial—untuk kondisi-kondisi tertentu—sulit untuk diciptakan sendiri dengan perkecualian pada kasus di Tongketongke. Kasus di Tongke-tongke justru dapat menjadi contoh tentang mekanisme dan proses penciptaan kembali relung yang pernah ‘hilang’ atas hasil prakarsa dan kerja sama di antara sesama warga sendiri, serta pengembangan aturan-aturan main yang kemudian disepakati bersama tentang siapa berhak menanam bakau di mana, apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya dilakukan, bagaimana pengalihan ‘hak’ atas lahan mangrove yang terbentuk itu, dsbnya. Namun, tidak semua komunitas pesisir mampu melaksanakannya, di antaranya adalah mereka yang melulu bertambak sebagai nafkah utama, dan yang belum tentu akan mengelola lahan tambak di tempat usahanya yang tidak selalu merupakan tempat tinggalnya secara menetap tetap. Dalam kasus semacam di Paojepe ini, serta petani padi/palawija yang harus berjuang menghadapi berbagai masalah lingkungan hidup dan kebijakan pemerintah seperti kasus di Batanghari, pendampingan oleh pihak luar tentunya bermanfaat. Namun, model bantuan atau pendampingan yang diperlukan seyogianya mampu membantu penduduk setempat dalam menciptakan situasi-situasi bagi pengambilan keputusan yang menunjang pengelolaan sumberdaya secara tangguh atas prakarsa dan upayanya sendiri, dan tidak atas rekayasa pihak pendamping. Penciptaan situasi ini tentunya menuntut pula perubahan dalam konteks yang dihadapi penduduk setempat dalam pengelolaan sumberdayanya. Dalam hal inilah, maka peranan pihak luar seperti ilmuwan dan pendamping diperlukan, ditunjang oleh pemahaman tentang pelbagai faktor yang berperan dalam menciptakan situasi pengambilan keputusan.

Dalam menjawab pertanyaan: ke manakah

pendampingan akan dilaksanakan, dan bagaimana hal itu dapat dilakukan, memerlukan kecermatan pengenalan masalahnya sejak awal. Sejumlah pertanyaan dapat menjadi acuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Bagaimanakah kondisi yang ada dalam hal pengetahuan ekologi penduduk setempat, serta eksistensi pranata sosial dalam komunitas lokal berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya alam? Telah mampu pulakah penduduk setempat menemukan masalah yang dihadapi dalam ‘relung’nya, terutama dalam situasi ketidakjelasan, risiko yang tinggi, serta ketidaklengkapan informasi? Bila telah ditemukan masalahnya oleh warga setempat, telah dikenalikah solusi untuk menanganinya? Adakah pengetahuan ekologi yang memadai serta skema interpretasi yang menunjang mereka untuk memahami situasi, dan mengambil keputusan yang tepat? Atau, diperlukankah penciptaan situasi yang lebih membantu mereka dalam pengambilan keputusan melalui perajutan dan pengembangan pranata sosial? Dalam upaya menelusuri berbagai faktor yang terkait dan berpengaruh dalam pengelolaan sumberdaya alam setempat, maka patut dicermati faktor-faktor ekonomi-politik-hukum dll. yang mempengaruhi terciptanya situasi-situasi pengambilan keputusan tertentu. Perlu pula disimak minat-minat dan kepentingan ekonomi berbagai pihak, termasuk penduduk setempat itu sendiri yang belum tentu sejalan dengan ‘harapan’ untuk ‘melestarikan’ kondisi relung mereka, atau dengan ‘harapan pihak pendamping’ dan *stakeholder* yang lain.

Dalam penerapan strategi pendampingan, para pendamping bukanlah pihak yang serba tahu dan mampu menyajikan informasi yang komprehensif serta pasti dalam situasi ketidakpastian dan ketidakjelasan yang besar. Sebaliknya, penduduk setempat memiliki seperangkat pengetahuan ekologi yang kaya, namun yang juga terbatas dalam memahami

kompleksitas hubungan-hubungan ekologis serta pengaruh berbagai faktor yang tidak selalu dapat diduga, terutama hal-hal yang berada di luar jangkauan pengamatan empiris atau yang ‘tidak memiliki makna penting’ dalam konteks kebudayaan mereka. Karena itu, hubungan ‘kemitraan’lah yang seyogianya melandasi pelaksanaan pendampingan. Masing-masing pihak dapat saling bertukar informasi dalam mencari solusi terbaik dan menciptakan situasi yang menunjang. Sejumlah kasus dalam tulisan ini juga menunjukkan bahwa pendampingan yang hanya memfokus pada salah satu hal, misalnya upaya pengalihan pengetahuan tanpa perajutan institusi sosial,

tidak mampu membantu individu-individu menginternalisasikan pengetahuan baru itu. Bila pengembangan institusi sosial yang dibenahi tanpa diimbangi dengan pengayaan pengetahuan tentang kondisi ekosistem yang memadai, maka patut dipertanyakan: ke arah kondisi bagaimanakah pengelolaan sumberdaya akan dilaksanakan warga setempat?

Sudah saatnya lah kini paradigma pengelolaan sumberdaya alam serta pendampingan oleh dan untuk berbagai pihak yang terlibat dilaksanakan dengan ‘keseriusan’, terutama dalam menyongsong era desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas di masa datang.

Kepustakaan

- Bourdieu, P.
- 1990 ‘*Structures, Habitus, Practices*’, dalam Co Lemert (peny.) *Social Theory: The Multicultural and Classic Readings*. Boulder: Westview Press. Hlm. 470-484.
- Brokensha, D., D.M. Warren dan O. Werner (peny.)
- 1980 *Indigenous Knowledge Systems and Development*. Lanham: University Press of America.
- Dilts, D. and S. Hate
- 1996 ‘IPM Farmer Field Schools: Changing Paradigms and Scaling-up,’ *Agricultural Research & Extension Network* 59b:1-4.
- Food and Agricultural Organization
- 1990 *Mid-term Review of FAO Intercountry Program for the Development and Application of Integrated Pest Control in Rice in South and South East Asia*. Mission Report phase II. Jakarta.
- Fliert, E. van de
- 1993 *Integrated Pest Management: Farmer Field Schools Generate Sustainable Practices: a Case Study in Central Java Evaluating IPM Training*. Wageningen: Agricultural University Wageningen.
- Fox, J.J.
- 1991 ‘Managing the Ecology of Rice Production in Indonesia’, dalam J. Hardjono (peny.) *Indonesia: Resources, Ecology, and Environment*. Singapore: Oxford University Press. Hlm. 61-84.
- Kenmore 1997
- 1997 ‘A Perspective on IPM’, dalam ‘Fighting Back with IPM’, *LEISA, ILEIA Newsletter for Low External Input and Sustainable Agriculture*, December, 13(4):8-9.
- Ostrom, E.
- 1992 *Crafting Institutions for Self-governing Irrigation Systems*. San Francisco: Institute for Contemporary Studies Press.

- 1994 Neither Market nor State: Governance of Common-pool Resource in the Twenty-first Century. Makalah disajikan di International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., Indiana University, Bloomington, Indiana. Workshop in Political Theory and Policy Analysis.
- 1999 Self-governance and Forest Resources. CIFOR. Occasional Paper no. 20. Bogor.
- Ostrom, E., L. Schroeder dan S. Wynne
- 1993 *Institutional Incentives and Sustainable Development: Infrastructure Policies in Perspective*. Boulder: Westview Press.
- Prioharyono, J.E., Y. Purwanto dan E.M. Choesin (peny.)
- 2000 Management of Mangrove Forests: Conversion and Reforestation of Mangrove on the Coast of Paojepe, Bonepute and Tongke-tongke, South Sulawesi. Annual Report, First Phase Interdisciplinary Research on the South Sulawesi Coast. Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP- Universitas Indonesia.
- Röling, N.G. dan E. van de Fliert
- 1998 'Introducing Integrated Pest Management in Rice in Indonesia: A Pioneering Attempt to Facilitate Large-scale Change', dalam N.G. Röling dan M.A.E. Wagemakers (peny.) *Facilitating Sustainable Agriculture: Participatory Learning and Adaptive Management in Times of Environmental Uncertainty*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 153-171.
- Strauss, C. dan N. Quinn
- 1997 *A Cognitive Theory of Cultural Meaning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- The Indonesian National IPM Program.
- n.d. *Farmers as Experts*. Jakarta.
- Warren, D.M., L.J. Slikkerveer dan D. Brokensha
- 1995 'Introduction', dalam D.M. Warren, L.J. Slikkerveer dan D. Brokensha (peny.) *The Cultural Dimension of Development: Indigenous Knowledge Systems*. London: Intermediate Technology Publications. Hlm. xv-xviii.
- Wilson, P. A.
- 1997 'Building Social Capital: A Learning Agenda for the Twenty-first Century', *Urban Studies* 34(5-6):745 – 760.
- Winarto, Y.T.
- 1996 Seeds of Knowledge: The Consequences of Integrated Pest Management Schooling on a Rice Farming Community in West Java. Disertasi tidak diterbitkan. The Australian National University.
- 2000 Farmers to Farmers, the Seeds of Empowerment: A Case of a Farmers' NGO's Self-governance in Central Lampung. Makalah dipresentasikan di Asian Studies Association of Australia Biennial Conference: 'Whose Millennium?' Melbourne: University of Melbourne. 3-5 Juli.
- Winarto, Y.T., H. Arifin, Y. Purwanto, J.E.M. Prioharyono, A. Qasim, B. Gala, dan M. Lampe
- 1999 Abrasion, Mangrove Conversion, Coral Reef Degradation: Cases from the Coastal of South Sulawesi and the Offshore of Pulau-pulau Sembilan. Manuskip. Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia dan UNESCO-MAB Jakarta.
- Winarto, Y.T., E.M. Choesin, Fadli, A.S.H. Ningsih, dan S. Darmono
- 2000 Satu Dasa Warsa Pengendalian Hama Terpadu: Berjuang Menggapai Kemandirian dan Kesejahteraan. Manuskip. Jakarta: Indonesian FAO - Inter Country Program.